

PRESS RELEASE ANTISIPASI KERAWANAN PUNGUT HITUNG, BAWASLU KOTA PASURUAN PETAKAN 22 INDIKATOR POTENSI TPS RAWAN

Nomor : 080/HM.00.02/K.JI-36/11/2024

Tanggal : 19/11/2024

Bawaslu Kota Pasuruan petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variasi dan 22 indikator diambil dari sedikitnya 34 kelurahan/desa di 4 Kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024 .

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, penyelenggara pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, riwayat sistem noken, tidak sesuai ketentuan dan/atau riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politisasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut :

7 (Tujuh) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi :

1. 87 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
2. 16 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
3. 43 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
4. 0 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
5. 3 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilihan;
6. 20 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK); dan
7. 1 TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, dan/atau gempa).

14 (Empat Belas) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Banyak Terjadi

1. 0 TPS terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
2. 5 TPS dekat dengan lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
3. 0 TPS sulit dijangkau;
4. 0 terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS;
5. 0 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
6. 0 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
7. 1 TPS dekat wilayah kerja (pertambangan, dan/atau pabrik);
8. 10 memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilu/pemilihan;
9. 4 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu/pemilihan ;
- 10.3 TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat pemilu/pemilihan;
- 11.0 TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat pemilu/pemilihan;
- 12.0 TPS yang ASN, TNI/Polri , kepala desa dan/atau perangkat desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu/pemilihan;
- 13.2 TPS di lokasi khusus; dan

14.0 TPS yang terdapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta pemilu/pemilihan.

1 (Satu) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi.

0 TPS yang terdapat Praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras antar golongan di sekitar lokasi TPS.

Jumlah TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Kota Pasuruan, KPU, Pasangan Calon, Pemerintah, Aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas , Bawaslu Kota Pasuruan melakukan strategi pencegahan, diantaranya :

1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
3. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
4. Kolaborasi dengan pemantau pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
5. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu Kota Pasuruan juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kota Pasuruan merekomendasikan KPU Kota Pasuruan untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS :

- a. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

- b. Berkoordinasi dengan seluruh *Stakeholder* , baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan *Stakeholder* lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu) melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.



Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan*

Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status TNI/Polri)	87	Purworejo, Panggungrejo
2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb)	16	Panggungrejo, Purworejo
3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK)	20	Purworejo, Panggungrejo
4. Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	43	Purworejo, Bugul Kidul
5. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	0	
6. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu	0	
7. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS	0	
8. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS	0	
9. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu	0	
10. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu	0	
11. Memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan	3	Gadingrejo

12.	Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan	10	Gadingrejo,Panggungrejo,Purworejo
13.	Memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan	0	
14.	Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan	4	Bugul Kidul, Panggungrejo
15.	TPS sulit dijangkau	0	
16.	TPS di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)	1	Gadingrejo
17.	TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	5	Purworejo, Panggungrejo
18.	TPS dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	1	Gadingrejo
19.	TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu	3	Gadingrejo
20.	TPS di Lokasi Khusus	2	Purworejo
21.	Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	0	
22.	Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	0	